

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin berkembang dan membaiknya akuntansi sektor publik di Indonesia ini, dengan demikian kebutuhan akan akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu kewajiban yang tak terbantahkan. Semakin tingginya harapan masyarakat atas akuntabilitas pemerintah, kini menjadi sebuah keharusan bagi lembaga pemerintah untuk memberikan informasi mengenai kegiatan dan kinerjanya kepada publik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hal tersebut, usaha yang bias dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyajikan pertanggungjawabannya kedalam bentuk laporan keuangan yang baik. Adapun tujuan dari laporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang terkait dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang mempunyai manfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan akuntansi, (SAK,2009). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disampaikannya laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk menghasilkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, (Soimah,2014).

Pemerintah sendiri memiliki kuasa dan memegang kendali penuh atas sumber-sumber yang signifikan, penggunaan sumber-sumber yang signifikan akan berdampak luas terhadap kesejahteraan rakyat, ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan fungsi antara manajemen dan pemilik sumber-sumber tersebut (Partono, 2000 dalam Nurillah 2014).

Beberapa pihak yang memanfaatkan informasi keuangan yang disampaikan dan *dishare* oleh pemerintah daerah dengan maksud dan tujuan yang beragam, Oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan atau disajikan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus disajikan dengan wajar tanpa adanya informasi yang dibuat-buat, karena hal ini akan menyebabkan kesalahan pemahaman dan salah dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Untuk itu dalam rangka memudahkan pengguna memahami laporan keuangan, pemerintah pusat dan daerah harus mematuhi standar akuntansi pemerintah yang sudah ditetapkan. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 yang menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga mampu memenuhi tujuannya, dimana karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi : keandalan, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Primayana dkk, 2014).

Setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan mendapat penilaian opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang akan diberikan BPK dalam pelaporan keuangan yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan diperiksa untuk

mengetahui apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai standar yang ditetapkan dan laporan keuangan yang diperiksa untuk membuktikan apakah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik, (Ichsan,2017)

Hal pertama yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (Lasmara, 2016). Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang aparatur mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Latar belakang SDM merupakan faktor yang akan mempengaruhi dalam pengerjaan tingkat kualitas laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas lulusan SMA belum sepenuhnya menguasai ataupun masih minimnya pengetahuan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, tentunya hal mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dikatakan bisa menyebabkan dampak pada sebuah laporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan selaras pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk. (2018), Sapitri dkk.(2015), dan Lasmara (2016). Menurut Wahyuni dkk. (2018) kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, menurut Sapitri dkk.(2015) kompetensi sumber daya manusia signifikan dan positif pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan dan terakhir

menurut Lasmara (2016) memberikan kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi (Nurillah, 2014). Berdasarkan PP N0.56 Tahun 2005 yang berisi tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pemerintah pusat dan daerah sangat bertanggungjawab terhadap perkembangan teknologi dan informasi dalam peningkatan akses pengelolaan informasi keuangan daerah serta penyaluran informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah (IKD) kepada masyarakat atau publik. Tentunya dengan teknologi dan informasi akan mampu membantu pegawai dalam menemukan adanya temuan-temuan yang menyimpang.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) dan Cahyandari (2017). Menurut Nurillah (2014) yang memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut penelitian Cahyandari (2017) memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern SPI (Sapitri dkk, 2014). Sistem Pengendalian Intern akan membantu rencana organisasi serta membantu untuk menjaga aset entitas, meneliti keamanan dan kejujuran data akuntansi, mendorong efisiensi dan

mendorong terciptanya kepatuhan terhadap hukum. Chambers dan Payne(2009)(dalam Cahyandari, 2017) membuktikan bahwa adanya undang-undang yang membahas tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Pengendalian intern merupakan pondasi good governance dan garis pertama dalam melawan ketidak absahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila sistem pengendalian intern suatu instansi lemah ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan berupa kecurangan (*Fraud*).

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri dkk (2014) dan Sudiarianti (2015). Menurut Sapitri dkk (2014) memberikan hasil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut penelitian Sudiarianti (2015) memberikan kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal keempat yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Pemerintah (Armel, 2017). Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai peran sebagai pengatur penyajian laporan keuangan dalam peningkatan laporan keuangan. Penerapan SAP mengharuskan entitas pelapor, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah menyampaikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan selama periode bersangkutan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 mengenai standar

akuntansi pemerintah. Baik maupun buruknya sebuah laporan keuangan tidak akan terlepas dari penerapan SAP yang dijalankan dengan tertib.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Armel (2017) dan Fikri (2015). Menurut Armel (2017) yang memberikan kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut penelitian Fikri (2015) memberikan kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari penelitian sebelum-sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyuni, dkk (2018) yang juga menyarankan untuk peneliti berikutnya melakukan penelitian lebih mendalam dengan menambah variable-variabel baru untuk menguji kualitas laporan keuangan (Contohnya : Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Pemerintahan). Keberadaan sistem akuntansi Pemerintahan tersebut diharapkan mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab penyelenggaraan APBD. Selain itu Pengendalian

Intern diharapkan mampu menjadi kontrol organisasi dalam memberikan jaminan kepada pihak internal maupun eksternal mengenai keakuratan informasi laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Dan juga untuk mendorong agar berhasil dan dalam pelaksanaannya lebih efisien dan kebijakan manajemen dapat terlaksana dengan baik. Adapun perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang mengacu pada penelitian Wahyuni, dkk (2018) adalah menambahkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai Variabel independen untuk memperkuat penelitian ini. Perbedaan kedua ada pada tahun dan tempat penelitian yang mana pada penelitian ini bertempat di Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun fungsi laporan keuangan pemerintah yaitu adalah untuk menggambarkan keadaan suatu pemerintahan dan sebagai salah satu sarana bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan sistem transparansi dan akuntabilitas keuangannya. Tujuan dari setiap pemerintah adalah untuk bias menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi sumber daya manusia (Wahyuni dkk, 2018; Roshanti dkk, 2014; Primayana dkk, 2014; dan Sudiarianti, 2015), pemanfaatan teknologi informasi (Wahyuni dkk, 2018; Nurillah, 2014; dan Diani 2014), sistem pengendalian intern (Armel, 2017; Lasmara, 2017, dan Primayana, 2014), dan

penerapan standar akuntansi pemerintah (Andini dan Yusrawati, 2015; dan Armel, 2017).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan mengenai hubungan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?

Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan kompetensi SDM memiliki pengaruh pada terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
2. Membuktikan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh pada terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
3. Membuktikan SPI memiliki pengaruh pada terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
4. Membuktikan penerapan SAP memiliki pengaruh terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka dari penelitian ini dapat manfaat untuk :

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut.

1. Bagi Praktisi

Menjadi sumber informasi dan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas.

2. Bagi Akademisi

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah pada SKPD.